

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jepang dan Korea Selatan merupakan dua negara mempunyai kesamaan yang saling berkaitan di antaranya adalah kesamaan dalam historis, nilai dan budaya. Akan tetapi hubungan bilateral di mana kedua negara sering kali mengalami ketegangan dan hal ini dipicu terkait permasalahan sejarah.¹ Pada masa pendudukan, Jepang banyak menerapkan kebijakan-kebijakan yang kejam terhadap masyarakat Korea Selatan, seperti melarang penggunaan bahasa Korea Selatan, memaksakan masyarakat Korea Selatan untuk menerima sistem penamaan Jepang, serta melakukan rekrut secara paksa yang dilakukan terhadap perempuan Korea Selatan untuk dijadikan budak seks tentara Jepang atau disebut juga sebagai *comfort women*.²

Permasalahan sejarah terkait *comfort women* masih terungkit sehingga menjadi alasan hubungan Jepang dan Korea Selatan sering memanas. Sering mengalami tuntutan oleh masyarakat Korea Selatan. Pada tanggal 28 Desember 2015, pemerintah Jepang dan Korea Selatan setuju untuk menyelesaikan permasalahan *comfort women* melalui *Japan-ROK Agreement on Comfort Women*.³ Perdana

¹ Mudji Hartono, "Nasionalisme Asia Timur : Suatu Perbandingan Jepang, Cina dan Korea," *Journal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, No. 1 (2008) <https://doi.org/10.21831/moz.v4i1.4388>

² Fiandara Dwi Adityani, "Memori dan Trauma dalam Hubungan Internasional: Pengaruh Isu "Comfort Women" terhadap Kerjasama Keamanan Jepang dan Korea Selatan," *Journal of International Relation* 4, No. 1 (2018): 22-23

³ Dinda Claudya Ayu Eka Putri, "Penolakan Korban Comfort Women System Dari Korea Selatan Terhadap 2015 Japan-ROK Agreement on Comfort Women," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 7 No. 3 (2018): 71-83

Menteri Jepang, Shinzo Abe, menyampaikan permintaan maaf yang tulus dan penyesalan terhadap semua korban wanita yang mengalami perbudakan seks, mengambil langkah-langkah untuk menyembuhkan luka psikologis kepada korban dan memberikan dukungan keuangan melalui anggaran kepada yayasan yang didirikan oleh pemerintah Korea Selatan.⁴ Selain itu, Korea Selatan juga menyatakan tidak akan lagi mengungkit permasalahan *comfort women* dan mengkritik pemerintah Jepang terkait dengan permasalahan tersebut selama pemerintah Jepang dapat memenuhi tanggung jawabnya.⁵

Meskipun demikian, permasalahan ini belum selesai dari sudut pandang korban dari Korea Selatan. Para korban memandang bahwa Pemerintah Jepang mengabaikan kepentingan dan hak-hak serta kondisi pasca perang para perempuan yang menjadi korban, sehingga upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Jepang tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan ini.⁶ Menurut masyarakat Korea Selatan perjanjian tersebut tidak adil dan berusaha berjuang melawan perjanjian tersebut, sedangkan Jepang berpendapat bahwa masalah tersebut telah diselesaikan dengan adanya perjanjian tersebut.⁷

Pada tahun 2018, Masyarakat Korea Selatan mengajukan permohonan terhadap salah satu perusahaan Jepang yaitu Mitsubishi Heavy Industries Ltd kepada pemerintah Korea Selatan untuk menjual aset-aset perusahaan karena selama enam

⁴ Junya Nishino, "Japan's Security Relationship with the Republic of Korea: Opportunities and Challenges." *Center for strategic and international studies*. 1-12

⁵ Putri. 71-83

⁶ Putri. 71-83

⁷ Lisbet. "Ketegangan Hubungan Jepang-Korea Selatan dan Implikasinya." *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 11 No. 14 (2019): 7-12

bulan terakhir tidak memberikan kompensasi dan penjualan digunakan untuk mengganti rugi korban kerja paksa.⁸ Dikarenakan hal ini, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe menganggap tindakan yang dilakukan oleh Korea Selatan telah melanggar hukum perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh Jepang dan Korea Selatan.⁹ Perdana Menteri Shinzo Abe juga menganggap yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan merupakan kerusakan rasa saling percaya.¹⁰ Pemerintah Jepang melakukan penghapusan Korea Selatan dari *whitelist* pada bidang kontrol dan regulasi ekspor. Selain itu mempertimbangkan kebijakan mengenai kenaikan tarif, pengetatan aturan terhadap remitansi, dan pembatasan visa bagi masyarakat Korea Selatan.¹¹ Menteri Perdagangan Jepang, Hiroshige Seko mengatakan bahwa pembatasan ekspor ini tidak bermaksud untuk merusak hubungan bilateral dengan Korea Selatan dan bukan untuk menghalangi perdagangan.¹²

Di samping itu, masyarakat Korea Selatan melakukan demonstrasi dan aksi boikot terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh Jepang pada tanggal 1 Juli 2019 melalui posting dengan tagar *#BoycottJapan*. Terdapat lebih dari 2,400 postingan dengan tagar *#BoycottJapan* yang dilengkapi dengan gambar keterangan

⁸ Lisbet. 7-12

⁹ “Hubungan Jepang-Korea Selatan, Konflik Panas di Laut Timur”, Kabar24, Januari 10, 2021, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190802/19/1132111/hubungan-jepang-korea-selatan-konflik-panas-di-laut-timur>

¹⁰ “South Korea and Japan’s feud explained.”, BBC, Januari 11, 2021, <https://www.bbc.com/news/world-asia-49330531>.

¹¹ Kiki Nindya Asih dan Masagung Suksmonohadi, “Ketegangan Jepang-Korea Selatan dan Dampaknya Pada Perekonomian”. *Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional III* (2019): 114

¹² “Japan to strike South Korea off white list of trusted trade partners, Seoul announces reciprocal action”, The Strait Times, April 17, 2021 <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/japan-will-strike-south-korea-off-white-list-of-trusted-trade-partners-effective-aug>

‘NO’ di mana huruf O merupakan ikon penting Jepang yaitu *Rising Sun*.¹³ Melalui tagar tersebut, masyarakat Korea Selatan melakukan pemboikotan terhadap perjalanan wisata ke Jepang dan produk-produk asal Jepang seperti mobil, bir dan kosmetik.¹⁴ Selain itu meluas hingga dunia hiburan di mana masyarakat Korea Selatan meminta para anggota *girlband K-Pop* yang memiliki kewarganegaraan Jepang untuk menarik diri dan kembali ke negara mereka dan tidak boleh dibayar sebagai pekerja di Korea Selatan.¹⁵

Dikarenakan pemboikotan yang dilakukan masyarakat Korea Selatan terhadap produk-produk Jepang dapat berdampak kepada kedua negara. Dampak bagi Jepang yaitu gerakan boikot terhadap produk dan jasa membuat Jepang mengalami penurunan penjualan yang dapat menjadi ancaman bagi ekonomi Jepang, pengurangan ekspor Jepang ke Korea Selatan sekitar JYP 4,6 miliar setahun dan penurunan jumlah wisatawan dari Korea Selatan ke Jepang sebesar 10% dan berdasarkan hasil survei Korea Herald, agen Travel pada dua minggu pertama Juli 2019 mengalami penurunan pesanan wisata ke Jepang antara 50% hingga 70% yang berpotensi menurunkan pendapatan Jepang bagi sektor jasa lebih dari USD 500 juta.¹⁶ Dampak bagi Korea Selatan adalah pengurangan impor mengenai persediaan semikonduktor terlebih bagi perusahaan besar seperti Samsung yang menyebabkan

¹³ “Boycott Japan : South Korean Instagrammers react to export curbs”, The Straits Times, Januari 9, 2021, <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/boycott-japan-south-korean-instagrammers-react-to-export-curbs>

¹⁴ “Korsel Boikot Mobil Jepang, Penjualan Anjlok”, CNN, Januari 9, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190805154902-92-418531/korsel-boikot-mobil-jepang-penjualan-rontok>

¹⁵ “Korean Netizens are Boycotting Japanese Members in K-Pop Groups”, Koreaboo, Januari 10, 2021, <https://www.koreaboo.com/news/korean-netizens-boycotting-japanese-members-kpop-groups/>

¹⁶ Asih dan Sukmonohadi, 114

perlambatan perekonomian bagi Korea Selatan. Meskipun demikian, permasalahan ini menyebabkan Jepang mengalami kerugian yang amat besar.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Takeshi Osuga mengatakan bahwa Perdana Menteri Shinzo Abe menolak untuk mundur dan permasalahan perburuhan pada masa lalu tidak dapat dikorbankan bagi kepentingan komersial.¹⁷ Hal ini menyebabkan 12 mantan *comfort women* mengajukan permohonan untuk ganti rugi terhadap pemerintah Jepang dan Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabulkan permintaan ganti rugi sebanyak 100 juta won masing-masing mantan *comfort women*.¹⁸ Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi mengatakan akan mempertimbangkan pilihan terhadap putusan pengadilan Korea Selatan serta mendesak Korea Selatan untuk berdiskusi dalam upaya mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan.¹⁹ Menanggapi hal ini tentu Jepang dihadapkan berbagai pilihan dalam merespon masalah pemboikotan oleh Korea Selatan dengan tetap menolak untuk mundur dalam permasalahan *comfort women* atau mempertimbangkan pilihan dengan melakukan diskusi bersama Korea Selatan dan menyelesaikan permasalahan *comfort women*. Hal ini menjadikan penelitian ini menarik untuk dibahas karena melihat bagaimana respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian *comfort women* 2015.

¹⁷ “Japan-South Korea dispute escalates as both sides downgrade trade ties”. Washington Post , Januari 11, 2021. https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/japan-downgrades-south-korea-as-trade-partner-as-bitter-dispute-escalates/2019/08/01/6a1d83ec-b4cc-11e9-8e94-71a35969e4d8_story.html

¹⁸ “Japan foreign minister protests S.Korea’s “comfort women” ruling” Kyodo News, April 19, 2021 <https://english.kyodonews.net/news/2021/01/70612452d5a3-japan-foreign-minister-protests-s-koreas-comfort-women-ruling.html>

¹⁹ “Japan mulls “various options” against S.Korea comfort women ruling” Kyodo News, April 19, 2021 <https://english.kyodonews.net/news/2021/01/ddcd159581a9-update1-japan-mulls-various-options-against-s-korea-comfort-women-ruling.html>

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya perjanjian Jepang dan Korea Selatan yang disetujui pada tanggal 28 Desember 2015, maka kedua pihak sepakat untuk tidak mengungkit permasalahan *comfort women*. Namun, masyarakat Korea Selatan masih menuntut pertanggungjawaban kepada Jepang terkait dengan *whitelist* terhadap Korea Selatan dan memperketat ekspor bahan-bahan pembuat ponsel yaitu *flourinated polymide*, *photoresist* dan *hydrogen flouride*. Hal ini tentu tidak hanya menimbulkan kerugian bagi Korea Selatan, tetapi juga pada Jepang. Jepang mengalami penurunan terhadap penjualan seperti bir, mobil, dan pakaian. Selain itu menurunnya wisatawan Korea Selatan ke Jepang pada pertengahan kedua tahun 2019 sebanyak 50%. Dikarenakan hal ini juru bicara Kementerian Luar Negeri, Takeshi Osuga mengatakan bahwa Perdana Menteri Shinzo Abe menolak untuk mundur dan permasalahan perburuhan pada masa lalu tidak dapat dikorbankan dalam kepentingan komersial dan Shinzo Abe juga menganggap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan merupakan kerusakan rasa percaya yang menyebabkan kegagalan dalam menghormati kesepakatan yang telah terjalin. Selain itu Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi mengatakan akan mempertimbangkan pilihan dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan *comfort women*. Maka dari itu, menarik untuk dikaji mengenai respon Jepang dalam menanggapi boikot yang dilakukan masyarakat Korea Selatan terkait permasalahan *comfort women*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian *comfort women* 2015?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian *comfort women* 2015.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pendidikan dan diharapkan menjadi sumbangan keilmuan Hubungan Internasional sebagai wawasan, pengetahuan maupun referensi mengenai respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian *comfort women* 2015.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan sebagai gambaran informasi dan pengetahuan terkait dengan penyelisihan antara Jepang dan Korea Selatan. Serta mendeskripsikan pilihan rasional Jepang dalam merespon terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian *comfort women* 2015.

1.6 Studi Pustaka

Penelitian-penelitian mengenai dinamika kawasan Asia Timur terutama Jepang dan Korea Selatan sudah banyak dilakukan dan pemboikotan terhadap produk suatu negara. Untuk itu dalam menganalisis judul yang diangkat, penulis mencoba

bersandar kepada penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik atau tema yang sama dengan judul penulisan. Pertama dalam artikel jurnal *The Comfort Women Controversy : Not Over Yet* karya Thomas J. Ward dan William D. Lay membahas mengenai permasalahan *comfort women* yang menjadi hambatan utama bagi hubungan Jepang dan Korea Selatan. Dalam artikel jurnal ini para penulis menjelaskan permasalahan *comfort women* yang menjadi topik yang selalu dilibatkan dalam hubungan Jepang dan Korea Selatan. Usaha yang dilakukan oleh Korea Selatan dibantu juga oleh Amerika Serikat terutama oleh masyarakat Korea-Amerika. Dalam artikel jurnal ini juga menceritakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam memperjuangkan keadilan bagi para korban *comfort women* untuk Jepang mengakui kesalahannya dan meminta maaf dengan tulus.²⁰

Artikel jurnal ini membantu penulis untuk melihat bagaimana perkembangan dari perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan dan masyarakat Korea-Amerika dalam menyelesaikan permasalahan *comfort women*. Pada tanggal 28 Desember 2015, Jepang dan Korea Selatan menandatangani perjanjian mengenai *comfort women*. Sehingga hubungan Jepang dan Korea Selatan jauh lebih baik dibandingkan sebelum adanya perjanjian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah fokus yang dibahas mengenai perkembangan, usaha, dan isu *comfort women* yang menjadi hambatan bagi hubungan antara Jepang dan Korea Selatan.

²⁰ Thomas J. Ward dan William D. Lay "The Comfort Women Controversy : Not Over Yet," *East Asia* 33 (2016): 255-269 <https://doi.org/10.1007/s12140-016-9260-z>

Kedua, dari Eugene Song dengan judul *South Korea Consumers' Attitudes toward Small Business Owners Participating in the 2019 Anti-Japan Boycott* membahas mengenai sikap konsumen dan pemilik usaha dalam berpartisipasi dalam pemboikotan produk Jepang pada tahun 2019.²¹ Dalam artikel jurnal ini menjelaskan mengenai penurunan penjualan produk Jepang sangat tinggi dikarenakan pemboikotan yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan. Pemboikotan dilakukan pada 1 Juli 2019 dikarenakan permasalahan sejarah antara Korea Selatan dan gerakan ini diprakarsai oleh konsumen Korea Selatan untuk menghindari pembelian produk dan layanan dari Jepang. Pemboikotan yang biasanya dilakukan oleh Korea Selatan hanya bersifat sementara tetapi pada Juli 2019 ini semakin membara dikarenakan banyaknya anak muda yang menyerukan melalui media sosial dan pemboikotan ini menjadi meluas dan lebih terorganisir. Secara khusus tidak hanya masyarakat saja yang melakukan pemboikotan tetapi pemilik usaha ikut berpartisipasi secara terbuka.

Artikel jurnal ini membantu penulis untuk melihat sikap pemilik usaha dan konsumen bersama-sama ikut dalam pemboikotan terhadap Jepang. Selain itu terdapat alasan semakin meluasnya yaitu adanya sifat patriotik yang mempengaruhi pembelian produk dalam negeri daripada produk impor, adanya motivasi dalam memboikot produk dari negara lain dan sikap terhadap keputusan untuk tetap membeli atau menolak dikarenakan adanya faktor kesadaran, sikap dan perilaku yang terbentuk. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti

²¹ Eugene Song "South Korea Consumers' Attitudes toward Small Business Owners Participating in the 2019 Anti- Japan Boycott" *Social Sciences (2020)*:1-15 ; doi:10.3390/socsci9050074

terletak pada partisipasi boikot dari pemilik usaha kecil untuk mempengaruhi motivasi dan niat boikot konsumen untuk memilih produk domestik dibandingkan produk impor.

Ketiga, artikel jurnal *(Re)producing the 'history problem': memory, identity and the Japan-South Korea trade dispute* karya Chris Deacon membahas mengenai permasalahan sejarah yang dialami oleh Jepang dan Korea Selatan secara sosial yang diproduksi dan direproduksi. Setelah Jepang menghapus Korea Selatan dari *whitelist* pada 2 Agustus 2019 dikarenakan hal ini Korea Selatan menyatakan untuk tidak akan pernah lagi kalah dari Jepang. Pernyataan tersebut dapat dianggap tidak hanya terfokus terhadap permasalahan perdagangan tetapi menyinggung kepada permasalahan sejarah yang telah dialami oleh Korea Selatan selama masa penjajahan Jepang.²²

Artikel jurnal ini membantu penulis untuk melihat pandangan Korea Selatan dalam permasalahan sejarah dengan Jepang. Korea Selatan membentuk identitas nasional melalui representasi masa lalu yang menganggap bahwa Jepang merupakan ancaman berkelanjutan bagi Korea Selatan. Korea Selatan memosisikan diri sebagai korban yang tidak bersalah dan Jepang merupakan penjajah yang mengabaikan dan tidak menyesali perbuatan dimasa lalu dan berusaha untuk melanjutkan tindakan tersebut. Tindakan Korea Selatan dalam menuntut Jepang merupakan hal yang dibenarkan agar Jepang dapat mengatasi masa lalu yang tidak pernah berakhir. Berbeda dengan Korea Selatan, Jepang berusaha melupakan masa

²² Chris Deacon, "(Re)producing the 'history problem': memory, identity, and the Japan-South Korea trade dispute", *Pacific Review* <https://doi.org/10.1080/09512748.2021.1897652>

lalu dan menyangkal hubungan masa perang dengan politik kontemporer. Jepang berusaha memosisikan diri sebagai rasional dan logis dalam upaya mengatasi sejarah. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang akan diteliti adalah Korea Selatan memberikan pandangan bahwa Jepang merupakan negara yang tidak menyelesaikan permasalahan sejarah dan Korea Selatan tindakan yang dilakukan oleh Korea Selatan merupakan hal yang wajar.

Keempat berasal dari artikel jurnal karya Kristin Vekasi dan Jiwon Nam dengan judul *Boycotting Japan : Explaining Divergence in Chinese and South Korean Economic Backlash* membahas perbedaan antara Korea Selatan dan Tiongkok mengenai pemboikotan terhadap Jepang. Hubungan antara Jepang dengan Korea Selatan dan Tiongkok dapat dianggap sebagai “politik yang dingin, ekonomi yang panas” dikarenakan memiliki hubungan ekonomi yang mendalam, hubungan perpolitikan yang sering menegang dan opini publik yang sering berseteru.²³

Artikel jurnal ini membantu penulis untuk melihat bagaimana permasalahan sejarah dikarenakan pendudukan Jepang pada masa lalu menjadi hambatan bagi Korea Selatan dan Tiongkok untuk melakukan kerja sama. Hal ini membuat Korea Selatan dan Tiongkok melakukan pemboikotan terhadap Jepang. Selain itu terdapat perbedaan antara Tiongkok dan Korea Selatan dalam melakukan pemboikotan. Tiongkok melakukan pemboikotan dikarenakan adanya perbedaan persepsi ekonomi dan budaya serta kebijakan luar negeri memberikan pandangan yang negatif kepada Jepang dan langsung menargetkan kepada pemboikotan

²³ Kristin Vekasi dan Jiwon Nam, “Boycotting Japan : Explaining Divergence in Chinese and South Korean Economic Backlash” *Journal of Asian Security and International Affairs*, 6, Issue 3 (2019): 299-326 <https://doi.org/10.1177%2F2347797019886725>

perekonomian. Sedangkan pandangan Korea Selatan terhadap Jepang tidak terlalu mengaitkan kepada perekonomian maupun budaya dan merasa memiliki ketergantungan perekonomian dengan Jepang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah terfokus kepada opini publik dari masyarakat Korea Selatan dan Tiongkok dalam pemboikotan yang terjadi.

Literatur terakhir yaitu *The Role of Historical Memory in Japan – South Korea Relations* karya Codruta Sintionean membahas mengenai konflik sejarah antara Jepang dan Korea Selatan yang sering terjadi dikarenakan permasalahan kerja paksa. Kerja paksa yang dilakukan Jepang menjadi perdebatan antara Jepang dan Korea Selatan pada sektor swasta terkhususnya industri pertambangan batu bara, fasilitas milet dan industri.²⁴ Artikel jurnal ini menjelaskan perjanjian pada tahun 1965 yang berisi Jepang akan memberikan kompensasi kepada korban dari masa kolonial seperti korban *comfort women* dan kerja paksa. Pada tahun 2019, terdapat 7 perusahaan Jepang termasuk di dalamnya, Nissan, Mitsubishi Heavy Industries, Toshiba dan Panasonic menjadi target dari penuntutan oleh masyarakat Korea Selatan.

Artikel jurnal ini membantu penulis untuk menjelaskan mengenai permasalahan sejarah menjadi faktor utama memanasnya hubungan antara Jepang dan Korea Selatan. Berawal dari adanya kerja paksa dan *comfort women* yang dilakukan oleh Jepang sehingga Korea Selatan menuntut kompensasi yang menyebabkan Jepang mengeluarkan Korea Selatan dari *whitelist* nya pada 4 Juli 2019. Menyebabkan

²⁴ Codruta Sintionean, “The Role of Historical Memory in Japan – South Korea Relations” *European Journal of Interdisciplinary Studies, Bucharest* 12 (Jun 2020) 53-60. Doi: 10.24818/ejis.2020.04

hubungan ekonomi dan politik kedua negara kembali memanas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah mengenai penjelasan permasalahan sejarah membuat hubungan antara Jepang dan Korea Selatan kembali memanas.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Rational Choice Theory

Rational choice theory menekankan kepada tindakan seseorang yang memiliki tujuan serta ditentukan oleh nilai.²⁵ Terdapat asumsi umum pada *rational choice theory* yaitu pertama manusia memiliki tujuan dan berorientasi pada tujuan, kedua manusia memiliki himpunan yang tersusun secara hierarki preferensi atau utilitas dan ketiga dalam memilih perilaku, manusia bersikap rasional dalam memilih keputusan dengan menggunakan perilaku alternatif yang mengacu pada urutan hierarki preferensi, biaya alternatif dan potensi terbaik untuk memaksimalkan utilitas.²⁶

Ide dasar dari *rational choice theory* adalah suatu perilaku sosial kumulatif dihasilkan dari perilaku para pelaku individu dalam membuat keputusan masing-masing.²⁷ Proses pengambilan keputusan oleh aktor untuk menentukan kepentingan nasional biasanya digambarkan sebagai rasional di mana rasionalitas di sini

²⁵ Nila Sastrawati, "Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, No. 2 (2019): 189, diakses Februari 22, 2021.

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/12730

²⁶ Maude Beaudry-Cyr, "Rational Choice Theory" *The Encyclopedia of Crime and Punishment* (2016): 1 DOI: 10.1002/9781118519639.wbecpx038

²⁷ Francis C. Uzonwanne, "Rational Model of Decision Making", *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance* (2016): 1-6 DOI 10.1007/978-3-319-31816-5_2474-1

merupakan perilaku yang bertujuan dan diarahkan kepada tujuan untuk menggunakan informasi terbaik yang tersedia dan memilih kemungkinan yang paling memungkinkan untuk memaksimalkan tujuannya.²⁸

Sehingga tindakan dua orang aktor dan setiap aktor dapat mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak lain. Aktor selalu memiliki tujuan dan dimaksimalkan untuk mewujudkan kepentingan masing-masing aktor.²⁹ Menurut Charles Kegley dan Shannon L. Blanton dalam membuat suatu kebijakan aktor biasanya menggambarkan perilaku sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan dalam mengambil keputusan terbaik dengan memperkirakan konsekuensi dalam memperkirakan hasil dari keputusan yang diambil. Terdapat empat inti dari *rational choice theory* menurut Kegley dan Blanton yakni sebagai berikut.³⁰

1. *Problem Recognition and Definition* (Identifikasi dan Definisi Permasalahan)

Merupakan kebutuhan dalam memutuskan pada saat pembuatan kebijakan dalam melihat permasalahan eksternal dan mencoba untuk mendefinisikan secara spesifik. Hal ini membutuhkan informasi yang lengkap mengenai tindakan, motivasi dan kapabilitas aktor lain dan lingkungan global serta tren. Dikarenakan

²⁸ Charles Kegley dan Shannon L. Blanton, "World Politics Trend and Transformation" Boston, USA : Cengage Brain (2011): 196

²⁹ Sastrawati. 189

³⁰ Kegley dan Blanton. 196

hal itu dibutuhkan pencarian informasi yang menyeluruh dan fakta yang dikumpulkan harus relevan dengan masalah.

2. *Goal Selection* (Penentuan Tujuan)

Aktor yang bertanggungjawab dalam membuat pilihan kebijakan luar negeri harus menentukan apa yang ini dicapai. Hal ini sering kali menjadi kesulitan bagi aktor sehingga membutuhkan identifikasi dan mengurutkan nilai seperti keamanan dan perekonomian dari yang terbaik hingga yang terburuk.

3. *Identification of Alternative* (Identifikasi Alternatif)

Dalam rasionalitas membutuhkan pengumpulan data lengkap dari semua kebijakan yang tersedia dan perkiraan biaya alternatif. Dalam upaya mencapai tujuan diperlukan tindakan yang diambil atau menentukan solusi dalam sebuah kebijakan. Alternatif kebijakan ini dapat mengubah permasalahan yang dihadapi di masa depan menjadi lebih baik.

4. *Choice* (Pilihan)

Rasionalitas membutuhkan pemilihan satu alternatif yang memiliki peluang yang terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan sehingga aktor harus melakukan analisis sarana, biaya dan manfaat dari kemungkinan keberhasilan. Selain itu menganalisis keuntungan dan kerugian sangat diperlukan sehingga memiliki peluang keuntungan pada setiap alternatif.

Berdasarkan penjelasan kerangka konsep di atas, *rational choice theory* sesuai untuk menganalisis respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea selatan pasca perjanjian *comfort women* 2015 dikarenakan respon yang diberikan oleh

Jepang merupakan pilihan rasional yang diambil terhadap pemboikotan. Penulis akan mendeskripsikan pilihan rasional respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian *comfort women* 2015 dengan menggunakan empat inti dari *rational choice theory* menurut Charles Kegley dan Shannon L. Blanton.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.³¹ Jenis penelitian adalah jenis penelitian deskriptif yang akan menghasilkan data deskriptif di mana penulis berusaha menggambarkan dan menyampaikan secara lengkap dan cermat masalah yang diteliti.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Rentang tahun ini dipilih, karena pada tahun 2015 merupakan saat perjanjian *comfort women* ditandatangani oleh Jepang dan Korea Selatan. Sementara, tahun 2021 dipilih karena Korea Selatan mengeluarkan Jepang dari *white paper* pertahanan. Dengan adanya batasan penelitian ini, penulis melihat

³¹ Saryono, "Metode Penelitian Kualitatif" Bandung : PT.Alfabeta (2010)

respon yang diberikan Jepang terkait dengan pemboikotan yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis adalah unit yang perilakunya akan diteliti, dijelaskan atau diramalkan dalam penelitian. Unit Analisis dalam penelitian ini adalah Jepang, dengan fokus respon Pemerintah Jepang. Sedangkan untuk unit eksplanasinya yaitu pemboikotan produk Jepang oleh masyarakat Korea Selatan. Level analisis pada penelitian ini adalah level negara. Hal tersebut didorong dikarenakan penelitian ini berfokus dalam melihat respon yang diberikan oleh Jepang terkait dengan pemboikotan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan teknik pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan metode dengan mendapatkan data melalui studi kepustakaan. Penulis memanfaatkan sumber data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan. Penulis memperoleh data-data sekunder yang bersumber dari jurnal, dokumen resmi, berita online, dan media sosial. Jurnal-jurnal Internasional yang penulis kumpulkan guna mendapatkan informasi terkait pasca perjanjian *comfort women* dan pemboikotan penulis dapatkan dari artikel jurnal *The Comfort Women Controversy : Not Over Yet* karya Thomas J. Ward dan William D. Lay, artikel jurnal *South Korea Consumers' Attitudes toward Small Business Owners Participating in the 2019 Anti-Japan Boycott* karya Eugene Song, artikel jurnal *(Re)producing the 'history problem': memory, identity and the Japan-South Korea trade dispute* karya Chris Deacon, dari artikel jurnal karya Kristin Vekasi dan Jiwon

Nam dengan judul *Boycotting Japan : Explaining Divergence in Chinese and South Korean Economic Backlash*, artikel Jurnal *The Role of Historical Memory in Japan – South Korea Relations* karya Codruta Sintionean.

Selain itu penulis juga mengumpulkan data-data dari media cetak online yang terkait dengan pemboikotan dan pasca perjanjian *comfort women* seperti (CNN, BBC, The Washington Post, The Diplomat dan sebagainya). Dalam pencarian data ini penulis menggunakan kata kunci *Boikot Jepang, Pemboikotan Korea Selatan, Rational Choice Theory, Perang Dagang, Penghapusan whitelist*.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian *comfort women* 2015. Awalnya penulis melakukan pengumpulan data terkait dengan respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian *comfort women* 2015. Sebelum mendeskripsikan respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan, penulis mengumpulkan data terkait dengan hubungan Jepang dan Korea Selatan terkait dengan permasalahan *comfort women* dan kepentingan Jepang dalam menandatangani perjanjian *comfort women* 2015. Setelah mendapatkan hasil dan mengaitkan temuan dengan kerangka konseptual. Dalam penulisan ini menggunakan konsep *rational choice theory* dan melalui konsep tersebut penulis akan menganalisis respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian *comfort women* 2015..

Kemudian tahap terakhir, penulis mengidentifikasi respon Jepang menggunakan empat indikator *rational choice theory* menurut Charles Kegley dan

Shannon L. Blanton yaitu *problem recognition and definition, goal selection, identification of alternative, choice*. Pertama, *problem recognition and definition* dalam hal ini penulis mengidentifikasi permasalahan yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan dalam permasalahan *comfort women* serta mendefinisikan secara mendetail mengenai pemboikotan oleh masyarakat Korea Selatan. Kedua, *goal selection* dalam hal ini penulis mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai oleh Jepang berdasarkan dengan *whitepaper* Jepang. Ketiga, *identification of alternative* dalam hal ini mengidentifikasi kerugian dan keuntungan masing-masing pilihan berdasarkan kepentingan yang terdapat pada *white paper* Jepang. Keempat, *choice* dalam hal ini memilih pilihan yang memiliki keuntungan terbaik bagi Jepang dalam merespon pemboikotan masyarakat Korea Selatan. Terakhir adalah penarikan kesimpulan untuk melihat bagaimana pilihan rasional Jepang dalam merespon pemboikotan yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan terkait perjanjian *comfort women* 2015.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu : latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II DINAMIKA HUBUNGAN JEPANG DAN KOREA SELATAN PASCA PERJANJIAN *COMFORT WOMEN* 2015

Dalam bab ini menjelaskan kepentingan Jepang dan Korea Selatan dalam menandatangani perjanjian *comfort women* 2015, penolakan Korban *comfort women* terhadap perjanjian *comfort women* 2015, dan ketidakstabilan hubungan Jepang dan Korea Selatan pasca perjanjian *comfort women* 2015.

BAB III PEMBOIKOTAN PRODUK JEPANG OLEH MASYARAKAT KOREA SELATAN 2019

Dalam bab ini penulis menjelaskan pemboikotan produk Jepang oleh masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian *comfort women* 2015 dan dampak pemboikotan Korea Selatan terhadap Jepang.

BAB IV RESPON JEPANG TERHADAP PEMBOIKOTAN MASYARAKAT KOREA SELATAN

Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai proses yang akan diambil oleh Jepang dalam merespon pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian *comfort women* 2015 menggunakan empat indikator dari *rational choice theory* menurut Charles Kegley dan Shannon L. Blanton.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian yang ditemukan serta saran dari peneliti terhadap penelitian selanjutnya.